

**Peningkatan Kesadaran Hak dan Kewajiban melalui
Diskusi Kelompok pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila di Kelas X-J SMA Negeri 2
Malang**

Devi Oktavia Sari, Suciati, Didik Iswahyudi, Lestari Andarwati

Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

devokta14@gmail.com

Abstract: *Pancasila education plays a strategic role in shaping character and fostering students' civic awareness. One important aspect of civic education is understanding the rights and obligations of citizens. However, initial observations in grades X-J of SMA Negeri 2 Malang indicate that students' understanding of this concept remains low. Students tend to be passive, less involved in discussions, and have not demonstrated a critical attitude towards national issues. This study aims to increase awareness of citizens' rights and obligations through the application of a group discussion model in Pancasila education learning. This study used a Classroom Action Research (CAR) approach in two cycles, consisting of planning, implementation, observation, and reflection. Data collection techniques included observation, tests, questionnaires, interviews, and documentation. The results showed an increase in conceptual understanding, active student participation, and a responsible attitude in learning. The average student score increased from 72 in cycle I to 81 in cycle II, with discussion participation increasing from 60% to 86%. Therefore, the group discussion model is recommended as an effective learning strategy for increasing students' civic awareness at the senior high school level.*

Key Words: *civic awareness; rights and obligations; group discussion; Pancasila education*

Abstrak: Pendidikan Pancasila memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan menumbuhkan kesadaran kewarganegaraan peserta didik. Salah satu aspek penting dalam pendidikan kewarganegaraan adalah pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Namun, hasil observasi awal di kelas X-J SMA Negeri 2 Malang menunjukkan bahwa pemahaman peserta didik terhadap konsep tersebut masih rendah. Peserta didik cenderung pasif, kurang terlibat dalam diskusi, dan belum menunjukkan sikap kritis terhadap isu-isu kebangsaan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban warga negara melalui penerapan model diskusi kelompok dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila. Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam dua siklus, yang terdiri atas tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, tes, angket, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konseptual, partisipasi aktif peserta didik, serta sikap bertanggung jawab dalam pembelajaran. Nilai rata-rata peserta didik meningkat dari 72 pada siklus I menjadi 81 pada siklus II, dengan partisipasi diskusi meningkat dari 60% menjadi 86%. Dengan demikian, model diskusi kelompok direkomendasikan sebagai strategi pembelajaran efektif dalam meningkatkan kesadaran kewarganegaraan peserta didik di tingkat sekolah menengah atas.

Kata kunci: kesadaran kewarganegaraan; hak dan kewajiban; diskusi kelompok; pendidikan Pancasila

Pendahuluan

Pendidikan Pancasila memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kesadaran kewarganegaraan peserta didik. Sebagai bagian dari kurikulum nasional, Pendidikan Pancasila tidak hanya bertujuan menanamkan nilai-nilai dasar negara, tetapi juga mengembangkan pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban warga negara. Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, pemahaman yang seimbang mengenai hak dan kewajiban menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Hak dan kewajiban merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum, pendidikan, dan kebebasan berpendapat, namun di sisi lain juga berkewajiban menaati hukum, membayar pajak, dan berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Ketidakseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban sering kali menimbulkan berbagai permasalahan sosial, politik, dan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan hak dan kewajiban tidak cukup hanya melalui pengetahuan konseptual, melainkan harus ditanamkan melalui proses pendidikan yang bermakna dan kontekstual. Namun, berdasarkan hasil observasi awal di kelas X-J SMA Negeri 2 Malang, ditemukan bahwa pemahaman peserta didik mengenai hak dan kewajiban masih tergolong rendah. Mereka cenderung memisahkan kedua konsep tersebut tanpa memahami keterkaitannya dalam kehidupan nyata. Selain itu, sikap pasif dalam diskusi kelas, rendahnya partisipasi, dan minimnya respons terhadap isu-isu kewarganegaraan menunjukkan lemahnya penghayatan peserta didik terhadap materi Pendidikan Pancasila. Pembelajaran yang masih bersifat satu arah seperti ceramah dan tugas hafalan belum efektif menumbuhkan kesadaran kritis dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran aktif dan partisipatif, seperti model diskusi kelompok, dapat menjadi solusi dalam membangun keterlibatan dan pemahaman peserta didik. Model diskusi kelompok mendorong peserta didik untuk saling bertukar pikiran, membangun argumentasi, dan mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, peserta didik tidak hanya memperoleh pemahaman kognitif, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan secara lebih dalam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara melalui penerapan model diskusi kelompok dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pembelajaran yang relevan dengan tuntutan abad ke-21, yang menekankan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan tanggung jawab sosial dalam membentuk karakter warga negara yang aktif dan demokratis.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara

melalui penerapan model diskusi kelompok dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila. Penelitian tindakan kelas dipilih karena memungkinkan guru untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan pembelajaran secara langsung di dalam kelas serta meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.

Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas X-J SMA Negeri 2 Malang yang berjumlah 36 orang. Pemilihan kelas dilakukan secara purposif berdasarkan hasil observasi awal yang menunjukkan rendahnya pemahaman peserta didik terhadap materi hak dan kewajiban warga negara serta minimnya keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran.

Penelitian dilaksanakan selama dua siklus yang masing-masing terdiri atas tahap perencanaan (*planning*), pelaksanaan tindakan (*acting*), observasi (*observing*), dan refleksi (*reflecting*), sesuai dengan model spiral Kemmis dan McTaggart. Setiap siklus dilaksanakan dalam dua kali pertemuan, masing-masing berdurasi 2×45 menit.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes, angket, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan meliputi: (1) lembar observasi untuk menilai aktivitas dan keterlibatan peserta didik dalam diskusi kelompok, (2) soal tes untuk mengukur pemahaman konseptual peserta didik terhadap materi hak dan kewajiban, (3) angket untuk mengetahui tanggapan peserta didik terhadap model pembelajaran, (4) pedoman wawancara untuk menggali informasi mendalam terkait proses pembelajaran, serta (5) dokumentasi berupa foto dan hasil kerja kelompok.

Data kualitatif dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Sementara itu, data kuantitatif dianalisis secara deskriptif dengan menghitung nilai rata-rata dan persentase ketuntasan belajar peserta didik. Penelitian ini dianggap berhasil apabila $\geq 85\%$ peserta didik memperoleh nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75, $\geq 80\%$ menunjukkan partisipasi aktif dalam diskusi, serta terdapat peningkatan sikap positif terhadap pelaksanaan pembelajaran berbasis diskusi kelompok.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Siklus I

Tahap perencanaan pada siklus I dimulai dengan penyusunan modul ajar yang memfokuskan pada penguatan pemahaman peserta didik terhadap hak dan kewajiban warga negara. Modul ini dilengkapi dengan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang memuat aktivitas diskusi berbasis studi kasus, seperti pelanggaran lalu lintas atau perilaku tidak disiplin di sekolah. Tujuannya adalah membangun keterkaitan antara materi ajar dan pengalaman keseharian peserta didik.

Dalam pelaksanaan tindakan, guru membuka pelajaran dengan mengaitkan materi dengan realitas peserta didik, lalu membagi mereka dalam enam kelompok heterogen. Masing-masing kelompok menerima studi kasus berbeda untuk dianalisis dan didiskusikan. Selama diskusi, guru berperan sebagai fasilitator, sementara peserta didik didorong untuk aktif berpendapat dan mencari solusi atas persoalan yang diberikan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa 60% peserta didik aktif dalam diskusi kelompok, namun masih terdapat dominasi oleh anggota tertentu serta adanya anggota yang pasif. Tes evaluasi menunjukkan bahwa 24 dari 36 peserta didik (66,7%) memperoleh nilai ≥ 75 , dengan

rata-rata kelas sebesar 72. Hasil angket menunjukkan 72% peserta didik merasa pembelajaran lebih menarik, namun masih ada yang belum percaya diri menyampaikan pendapat.

Refleksi terhadap siklus I mengindikasikan perlunya penguatan struktur kelompok melalui pembagian peran (ketua, pencatat, penyaji, pengamat) serta penggunaan pertanyaan pemantik yang lebih kontekstual agar semua anggota terlibat aktif.

2. Hasil Siklus II

Pada tahap perencanaan siklus II, dilakukan revisi modul ajar dan LKPD berdasarkan refleksi siklus I. Studi kasus dalam LKPD diubah agar lebih kontekstual, seperti isu etika bermedia sosial. Selain itu, peran dalam kelompok dijelaskan dengan rinci, dan tiap anggota diberi tanggung jawab khusus.

Selama pelaksanaan, diskusi berlangsung lebih dinamis. Guru memberikan umpan balik langsung, memastikan seluruh anggota aktif menyampaikan pendapat saat presentasi kelompok. Partisipasi meningkat signifikan dan suasana kelas menjadi lebih hidup. Peserta didik mulai mengaitkan konsep hak dan kewajiban dengan pengalaman pribadi, misalnya pelaksanaan piket kelas dan pemanfaatan ruang belajar bersama.

Hasil observasi menunjukkan bahwa 86% peserta didik aktif berdiskusi. Tes evaluasi menunjukkan peningkatan, dengan 32 dari 36 peserta didik (88,9%) memperoleh nilai ≥ 75 dan rata-rata kelas naik menjadi 81. Angket menunjukkan bahwa 86% peserta didik merasa pembelajaran lebih menyenangkan dan kontekstual, serta membantu mereka memahami hubungan antara hak dan kewajiban secara lebih nyata. Wawancara mendalam menguatkan bahwa diskusi kelompok membuat mereka lebih sadar bahwa hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang.

3. Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model diskusi kelompok efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta didik terhadap hak dan kewajiban warga negara. Temuan ini sejalan dengan pendapat Pratiwi & Nugroho (2023) yang menyatakan bahwa diskusi kelompok dapat meningkatkan partisipasi belajar serta membentuk karakter kewarganegaraan peserta didik. Melalui diskusi, peserta didik tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga membangun pemahamannya melalui interaksi sosial dan pertukaran gagasan. Hal ini sesuai dengan teori konstruktivisme yang menekankan pentingnya pengalaman aktif dalam proses belajar (Sanjaya, 2021). Pembagian peran dalam kelompok memperkuat rasa tanggung jawab dan meningkatkan akuntabilitas individual dalam kerja sama kelompok (Limbong et al., 2021).

Studi kasus yang kontekstual terbukti membuat pembelajaran lebih bermakna. Ketika peserta didik membahas etika bermedia sosial, mereka mampu mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, yang memperkuat internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan. Hal ini selaras dengan pandangan Satori et al. (2017) bahwa pendekatan kontekstual mampu menjembatani teori dan praktik dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila.

Selain aspek kognitif, diskusi kelompok juga berdampak pada pengembangan aspek afektif dan sosial peserta didik, seperti kerja sama, empati, tanggung jawab, dan saling menghargai. Hal ini merupakan bagian dari tujuan utama Pendidikan Pancasila dalam membentuk warga negara yang demokratis dan berkeadilan (Kuahaty et al., 2021).

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa model diskusi kelompok tidak hanya meningkatkan hasil belajar secara akademik, tetapi juga membentuk sikap dan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Oleh karena itu, guru Pendidikan Pancasila sangat disarankan untuk mengintegrasikan model ini ke dalam praktik pembelajaran yang menekankan nilai dan konteks kehidupan nyata.

Kesimpulan

Penerapan model diskusi kelompok dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila terbukti mampu meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Peningkatan terlihat pada aspek kognitif, ditunjukkan melalui kenaikan rata-rata nilai dan persentase ketuntasan belajar peserta didik dari siklus I ke siklus II. Selain itu, partisipasi aktif peserta didik dalam diskusi meningkat secara signifikan, mencerminkan keterlibatan emosional dan sosial yang lebih kuat dalam proses pembelajaran.

Secara pedagogis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskusi kelompok efektif digunakan dalam materi yang menuntut pemahaman nilai dan konteks kehidupan sehari-hari, seperti hak dan kewajiban warga negara. Pembelajaran menjadi lebih bermakna ketika peserta didik diberi kesempatan untuk mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi, serta diberi ruang untuk berdialog, berargumentasi, dan bekerja sama secara aktif.

Model diskusi kelompok tidak hanya membangun pengetahuan konseptual peserta didik, tetapi juga menumbuhkan sikap kritis, tanggung jawab, empati, dan kesadaran sosial sebagai wujud internalisasi nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, model ini layak direkomendasikan sebagai strategi pembelajaran utama dalam Pendidikan Pancasila, khususnya pada materi yang bersifat kontekstual dan nilai.

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar guru-guru Pendidikan Pancasila mengembangkan perangkat pembelajaran yang mendukung pelaksanaan diskusi kelompok secara optimal, termasuk modul ajar berbasis studi kasus kontekstual dan lembar kerja yang merangsang kolaborasi serta refleksi kritis. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan untuk menguji efektivitas model ini dalam konteks sekolah berbeda, jenjang pendidikan lain, atau pada materi-materi PPKn lainnya guna memperkuat validitas temuan.

Daftar Pustaka

- Arifin, M. Z., & Maryani, E. (2019). Model pembelajaran aktif dalam meningkatkan kesadaran kewarganegaraan peserta didik. *Jurnal Civic Education*, 8(1), 45–53.
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik (Edisi revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi, A. R., & Wijaya, I. M. A. (2022). Penerapan diskusi kelompok dalam pembelajaran PPKn untuk membangun karakter peserta didik. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(3), 204–215.
- Kuahaty, L., Sari, M., & Handayani, L. (2021). Urgensi kesadaran warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan nasional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 9(2), 188–198.
- Liany, E., Nuraini, & Fadillah, S. (2020). Pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya pembentukan karakter bangsa. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 10(1), 55–63.

- Limbong, Y., Siregar, A. R., & Hutagalung, J. (2021). Hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif pendidikan Pancasila. *Jurnal Konstitusi dan Kewarganegaraan*, 6(2), 132–141.
- McNiff, J. (2017). *Action research: All you need to know*. London: SAGE Publications.
- Pasaribu, B., Kurniawan, D., & Setiawan, A. (2020). Ketimpangan hak dan kewajiban dalam praktik kehidupan berbangsa. *Jurnal Demokrasi dan Hukum*, 11(2), 101–112.
- Pratiwi, F., & Nugroho, A. (2023). Efektivitas model diskusi kelompok dalam meningkatkan partisipasi peserta didik pada mata pelajaran PPKn. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 18(1), 67–75.
- Sanjaya, W. (2021). *Strategi pembelajaran: Berorientasi standar proses pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Satori, D., Pranoto, B., & Wulandari, R. (2017). Hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif hukum dan pendidikan. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 98–107.
- Supriyadi, T., & Widodo, W. (2020). Pendidikan Pancasila dan pembentukan karakter bangsa. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 14(1), 22–31.
- Wibowo, A., Zulfikar, T., & Amalia, R. (2024). Transformasi nilai karakter dalam pembelajaran kewarganegaraan abad 21. *Jurnal Civic Engagement*, 4(1), 10–23.